



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANYUMAS

RTP 2024-2026

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024-2026



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, disusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang memuat pengelolaan risiko beserta

pengendalian atas risiko yang menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Tujuan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan berdaya saing, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan SDM, Memperkuat ketahanan pangan. Rencana Tindak Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP Strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk memberikan acuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah terjadinya risiko dan mendukung pencapaian keberhasilan tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

D. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- 2) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 3) Mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 dan merencanakan tindak pengendalian atas risiko yang tepat.

E. Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, antara lain:

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing	1	Mewujudkan ASN profesional	1	Meningkatkan kinerja dan kompetensi ASN
		2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2	Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik serta meningkatkan keterbukaan informasi publik
		3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif	3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah yang berbasis pada Reformasi Birokrasi tematik dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan produk potensi ekonomi daerah
		5	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	5	Mengoptimalkan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
				6	Menurunkan potensi konflik politik serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat
		6	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	7	Meningkatkan kualitas permukiman dan cakupan infrastruktur pelayanan dasar
				8	Merencanakan penataan kawasan strategis, pengembangan dan konektivitas wilayah untuk persiapan pemekaran wilayah
7	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana	9	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengoptimalkan pengelolaan risiko bencana serta penyelenggaraan penataan ruang		

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi
		8	Meningkatkan kapabilitas riset dan inovasi	10	Meningkatkan kualitas hasil riset serta pengembangan inovasi daerah yang tepat guna
3	Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	9	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	11	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin
				12	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat rentan miskin
				13	Meningkatkan layanan PPKS
		10	Meningkatkan Kesempatan kerja	14	Meningkatkan iklim investasi dan usaha
		11	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	15	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		12	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	16	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
		13	Meningkatkan derajat pendidikan	17	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
		14	Meningkatnya literasi masyarakat	18	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui literasi digital
		15	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk	19	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keluarga berencana
		16	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	20	Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan Anak
17	Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda	21	Meningkatkan peran aktif pemuda serta prestasi pemuda dan olahraga		
4.	Memperkuat ketahanan pangan	18	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri.	22	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan
		19	Meningkatkan keterjangkauan pangan	23	Meningkatkan keterjangkauan harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan
		20	Mengoptimalkan Pemanfaatan Pangan	24	Meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal

Sumber: RPD Bappedalitbang, 2023

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-

komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

2.4 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi tujuan/sasaran sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif;
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dilakukan pada tahun 2024 berdasarkan kuisisioner yang diisi oleh seluruh Perangkat Daerah. Berikut gambaran hasil lingkungan pengendalian Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026:

Tabel 1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Sumber: Aplikasi MRI, 2024

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa 7 (tujuh sub unsur) memadai dan 1 (satu) sub unsur kurang memadai yaitu Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pada sub unsur Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan mempunyai kelemahan, yaitu pegawai yang bertugas di OPD merupakan bukan pegawai tetap dan pegawai yang bersifat adhoc (sementara).

**REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
 CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

PEMDA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN : 2024-2026

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																														KESIMPULAN KUISIONER CEE					
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30		Modus				
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																														Memadai						
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																														Memadai						
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	3	3	4	2	3	4	4	3	2	2	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai	

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																														KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30		Modus
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	2	4	3	2	3	4	3	4	4	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																														Memadai		
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	1	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																														KESIMPULAN KUOSIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30		Modus	
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																														Kurang Memadai			
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	2	3	4	3	3	4	3	1	3	3	3	4	4	3	Memadai	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	1	3	3	3	4	4	3	Memadai	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	4	4	2	3	3	2	2	4	4	1	3	3	3	4	3	2	Kurang Memadai	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	1	3	3	3	4	4	3	Memadai	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																														Memadai			
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai		

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																												KESIMPULAN KUOSIONER CEE			
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	R30	Modus
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																												Memadai				
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	4	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	Memadai	
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai	
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	1	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai	
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																												Memadai				
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai	

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																														KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30		Modus
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	Memadai	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	Memadai	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																														Memadai		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai

Data Koresponden

R1. Pemkab Banyumas
R2. Dindik
R3. Dinkes
R4. RSUD Banyumas
R5. RSUD Ajibarang

R6. DPU
R7. Dinperkim
R8. BPBD
R9. Kesbangpol
R10. Satpol PP

R11. Dinsospermasdes
R12. Dinakerkop UKM
R13. DLH
R14. Dindukcapil
R15. DPPKBP3A

R16. Dinhub
R17. Dinkominfo
R18. DPMPPTSP
R19. Dinporabudpar
R20. Dinarpusda

R21. Dinkannak
R22. Dinperten KP
R23. Dinperindag
R24. Setda
R25. Setwan

R26. Inspektorat
R27. Bappedalitbang
R28. Bapenda
R29. BKAD
R30. BKPSDM

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Banyumas**

PEMDA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN : 2024-2026

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang disusun oleh agen perubahan di sebagian besar Perangkat Daerah, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal. Selain itu, banyaknya inovasi yang telah diciptakan juga harus terus di monitoring efektivitasnya	Menetapkan agen perubahan di sebagian besar perangkat daerah yang telah disertai dengan penyusunan rencana aksi. Selain itu pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap delapan area perubahan RB dan core value ASN BerAKHLAK	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
2	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Pemerintah Kabupaten Banyumas belum melakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan	Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, ditunjukkan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah 73,08 dengan kategori BB	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
3	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Belum semua perangkat daerah melakukan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peta proses bisnis	Peta Proses Bisnis telah dilakukan penyesuaian dan telah ditetapkan pada seluruh perangkat daerah	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
4	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Rencana Aksi terkait Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas Tahun 2020-2024 masih harus dijabarkan secara lebih konkrit disertai dengan timeline dan target yang jelas pertahunnya	Telah meningkatkan kualitas SPBE dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (Masterplan Smart City Kabupaten Banyumas) Tahun 2020-2024	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
5	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Penerapan sistem merit secara keseluruhan belum berjalan dengan maksimal ssalah satunya karena belum dilakukan assesment kepada seluruh pegawai dan belum ada pemanfaatannya kepada pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta sistem reward dan punishment berdasarkan hasil kinerja	Dalam peningkatan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) telah dilakukan upaya melalui pelaksanaan analisa kebutuhan pegawai, penerimaan yang transparan, dan menetapkan kinerja ASN melalui SKP	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Dua unit kerja yang diajukan untuk memperoleh predikat Zona Integritas tersebut belum ada yang mendapatkan predikat WBK	Adanya upaya peningkatan pengawasan telah mengajukan dua unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK Tahun 2022	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
7	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Peran APIP sebagai quality assurance and consulting belum optimal, hal tersebut terlihat pada level Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2	Telah dilakukan upaya peningkatan pengawasan	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
8	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi belum dilakukan pemantuan secara terus menerus atau berkala untuk memastikan aplikasi yang ada dapat terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik	inovasi berupa berbagai aplikasi pelayanan telah dibuat dan telah dilakukan monitoring dan evaluasinya melalui SIAPPMas (Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas)	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
9	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	1. Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasi secara luas melalui website resmi Pemda dan PD 2. Masih ada indikator kinerja pada sebagian kecil PD yang belum cukup mengukur sasaran/ tujuan dan mendukung kinerja di atasnya 3. Penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja baik di tingkat pusat maupun sebagian PD belum sepenuhnya menyesuaikan dan mempertimbangkan realisasi capaian tahun sebelumnya 4. Pohon kinerja yang disusun oleh sebagian PD belum sepenuhnya mengidentifikasi Critical Succes Factor (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat	Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen lainnya termasuk pada tingkat Perangkat Daerah (PD). Dan Rumusan tujuan dan sasaran pada Pemerintah Kabupaten Banyumas serta sebagian besar PD telah berorientasi hasil dengan indikator kinerja yang rata-rata telah spesifik, relevan, terukur dan cukup	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
10	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berkala sebagai referensi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program atau kegiatan masih harus lebih dioptimalkan	Pemerintah Kabupaten Banyumas dan PD telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan telah memiliki rencana aksinya untuk pencapaian kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran tersebut telah disusun pedoman formulasi perhitungan yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU) di level Pemda dan PD. Serta pengukuran kinerja dan keuangan dan capaian kinerja individu telah memanfaatkan teknologi informasi yakni melalui Jegos 3.0 dan Simpatik	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
11	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	Masih ada laporan kinerja pada sebagian kecil PD yang belum mengungkapkan informasi yang cukup terkait analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan capaian kinerja	Laporan kinerja di tingkat Pemda dan sebagian besar PD telah menyajikan informasi yang memadai terkait dengan capaian kinerja, perbandingannya dengan target di akhir periode maupun perbandingan dengan tahun lalu, serta analisis penyebab kegagalan/keberhasilan dalam pencapaian kinerja serta program-program unggulan apa saja yang mempengaruhi tercapainya kinerja. Selain itu, laporan kinerja juga telah menyajikan informasi terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
12	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	1. Inspektorat masih harus terus mengawal perbaikan manajemen kinerja pada seluruh PD terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya 2. Masih diperlukan peningkatan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan serta rekomendasi yang relevan untuk seluruh PD secara merata 3. Masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih menajamkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 4. Perlunya peningkatan fungsi konsultasi kepada PD agar fokus target PD tidak sekadar penghargaan tapi perbaikan berkelanjutan pada implementasi SAKIP	Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD dan telah memberikan rekomendasi perbaikan yang cukup spesifik pada masing-masing PD dan telah dipantau tindak lanjutnya, serta telah menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam melakukan evaluasi SAKIP	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
13	-	-	- Peraturan Daerah Kabupaten. Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Perbup No 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Risiko di Pemkab Banyumas - SK Bupati Banyumas No. 050/128/2023 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemkab Banyumas Tahun 2023	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
14	-	-	QA/Pendampingan oleh BPKP dalam penyusunan Dokuem Perencanaan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan Evaluasi oleh BPKP terhadap PM dan PK SPIP (termasuk komponen MRI)	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
15	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	Pada komponen perencanaan kinerja: penjenjangan kinerja masih belum sepenuhnya sempurna, khususnya terhadap CSF yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan kelogisan hubungan sebab-akibat, serta penetapan target pada RPD 2024-2026 masih banyak yang belum tersedia datanya (not available)	Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyempurnakan penjenjangan kinerja mulai dari level Pemda sampai Perangkat Daerah dengan menggunakan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja berdasarkan Permenpan RB No 89 Tahun 2021 dan memanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026 dan renstra 2024-2026	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
16	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	pada komponen pengukuran kinerja: IKU di level Pemda dan Perangkat daerah belum dipublikasi, baru sebagian perangkat daerah yang memanfaatkan monev pada e-sakip sebagai bagian dari dialog kinerja khususnya pada pencapaian kinerja yang belum sesuai target, serta belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam pengembangan kompetensi, rotasi, mutasi dan promosi.	pemanfaatan teknologi informasi mulai dari perencanaan kinerja melalui e-RPJMD, e-RPD, e-renstra, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja melalui e-sakip, e-monev, satria, jegos, simpatik	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
17	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	pada komponen pelaporan kinerja: laporan kinerja belum menyampaikan perbandingan data kinerja dengan target nasional, belum menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan jangka menengah dan analisis faktor pendukung atau penghambat keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja serta solusi yang dilakukan.	Melakukan pemanfaatan teknologi informasi mulai dari perencanaan kinerja melalui e-RPJMD, e-RPD, e-renstra, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja melalui e-sakip, e-monev, satria, jegos, simpatik. Selain itu mitigasi risiko atas pencapaian tujuan dan sasaran juga diakomodir dalam aplikasi e-SPIP dan MRI. Keseluruhan aplikasi tersebut terintegrasi satu sama lain dan saling mendukung dalam manajemen kinerja.	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
18	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	pada komponen evaluasi: tindak lanjut rekomendasi hanya berupa bukti dukung dan status tanpa ada penjelasan secara rinci/validasi terhadap sejauh manatindak lanjut/perbaikan tersebut telah dilakukan perangkat daerah	Pemerintah Banyumas telah menyusun pedoman evaluasi AKIP internal sesuai Menpan RB No 88 Tahun 2021 dan telah dilakukan evaluasi internal pada seluruh perangkat daerah sebanyak 56 PD; dan kualitas LHE tidak hanya berfokus pada aspek keberadaan namun juga aspek kualitas dan pemanfaatan serta dilakukan pemantauan terhadap rekomendasi kepada PD; serta komitmen pimpinan dan jajaran dalam mewujudkan budaya kinerja dan manajemen kinerja yang baik serta konsisten.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

3.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Form 1.c.

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Banyumas

PEMDA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN : 2024-2026

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Kurang Memadai	<p>- 1. Inspektorat masih harus terus mengawal perbaikan manajemen kinerja pada seluruh PD terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya 2. Masih diperlukan peningkatan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan serta rekomendasi yang relevan untuk seluruh PD secara merata 3. Masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih menajamkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 4. Perlunya peningkatan fungsi konsultasi kepada PD agar fokus target PD tidak sekadar penghargaan tapi perbaikan berkelanjutan pada implementasi SAKIP</p> <p>-Dua unit kerja yang diajukan untuk memperoleh predikat Zona Integritas tersebut belum ada yang mendapatkan predikat WBK</p> <p>- Rencana Aksi terkait Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas Tahun 2020-2024 masih harus dijabarkan secara lebih konkrit disertai dengan timeline dan target yang jelas pertahunnya</p>	Memadai		Kurang Memadai	<p>- 1. Inspektorat masih harus terus mengawal perbaikan manajemen kinerja pada seluruh PD terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya 2. Masih diperlukan peningkatan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan serta rekomendasi yang relevan untuk seluruh PD secara merata 3. Masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih menajamkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 4. Perlunya peningkatan fungsi konsultasi kepada PD agar fokus target PD tidak sekadar penghargaan tapi perbaikan berkelanjutan pada implementasi SAKIP</p> <p>- Dua unit kerja yang diajukan untuk memperoleh predikat Zona Integritas tersebut belum ada yang mendapatkan predikat WBK</p> <p>- Rencana Aksi terkait Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas Tahun 2020-2024 masih harus dijabarkan secara lebih konkrit disertai dengan timeline dan target yang jelas pertahunnya</p>

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasi secara luas melalui website resmi Pemda dan PD 2. Masih ada indikator kinerja pada sebagian kecil PD yang belum cukup mengukur sasaran/ tujuan dan mendukung kinerja di atasnya 3. Penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja baik di tingkat pusat maupun sebagian PD belum sepenuhnya menyesuaikan dan mempertimbangkan realisasi capaian tahun sebelumnya 4. Pohon kinerja yang disusun oleh sebagian PD belum sepenuhnya mengidentifikasi Critical Succes Factor (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat - Masih ada laporan kinerja pada sebagian kecil PD yang belum mengungkapkan informasi yang cukup terkait analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan capaian kinerja - Pada komponen perencanaan kinerja: penjenjangan kinerja masih belum sepenuhnya sempurna, khususnya terhadap CSF yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan kelogisan hubungan sebab-akibat, serta penetapan target pada RPD 2024-2026 masih banyak yang belum tersedia datanya (not available) - Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi belum dilakukan pemantuan secara terus menerus atau berkala untuk memastikan aplikasi yang ada dapat terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik 	Memadai		Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasi secara luas melalui website resmi Pemda dan PD 2. Masih ada indikator kinerja pada sebagian kecil PD yang belum cukup mengukur sasaran/ tujuan dan mendukung kinerja di atasnya 3. Penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja baik di tingkat pusat maupun sebagian PD belum sepenuhnya menyesuaikan dan mempertimbangkan realisasi capaian tahun sebelumnya 4. Pohon kinerja yang disusun oleh sebagian PD belum sepenuhnya mengidentifikasi Critical Succes Factor (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat - Masih ada laporan kinerja pada sebagian kecil PD yang belum mengungkapkan informasi yang cukup terkait analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan capaian kinerja - Pada komponen perencanaan kinerja: penjenjangan kinerja masih belum sepenuhnya sempurna, khususnya terhadap CSF yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan kelogisan hubungan sebab-akibat, serta penetapan target pada RPD 2024-2026 masih banyak yang belum tersedia datanya (not available) - Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi belum dilakukan pemantuan secara terus menerus atau berkala untuk memastikan aplikasi yang ada dapat terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang disusun oleh agen perubahan di sebagian besar Perangkat Daerah, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal. Selain itu, banyaknya inovasi yang telah diciptakan juga harus terus di monitoring efektivitasnya 	Memadai		Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang disusun oleh agen perubahan di sebagian besar Perangkat Daerah, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal. Selain itu, banyaknya inovasi yang telah diciptakan juga harus terus di monitoring efektivitasnya

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
			<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua perangkat daerah melakukan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peta proses bisnis - pada komponen evaluasi: tindak lanjut rekomendasi hanya berupa bukti dukung dan status tanpa ada penjelasan secara rinci/validasi terhadap sejauh manatindak lanjut/perbaikan tersebut telah dilakukan perangkat daerah - Pemerintah Kabupaten Banyumas belum melakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan 				<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua perangkat daerah melakukan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peta proses bisnis - pada komponen evaluasi: tindak lanjut rekomendasi hanya berupa bukti dukung dan status tanpa ada penjelasan secara rinci/validasi terhadap sejauh manatindak lanjut/perbaikan tersebut telah dilakukan perangkat daerah - Pemerintah Kabupaten Banyumas belum melakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Memadai	--	Memadai		Memadai	--
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berkala sebagai referensi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program atau kegiatan masih harus lebih dioptimalkan 	Memadai		Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berkala sebagai referensi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program atau kegiatan masih harus lebih dioptimalkan
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - pada komponen pengukuran kinerja: IKU di level Pemda dan Perangkat daerah belum dipublikasi, baru sebagian perangkat daerah yang memanfaatkan monev pada e-sakip sebagai bagian dari dialog kinerja khususnya pada pencapaian kinerja yang belum sesuai target, serta belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam pengembangan kompetensi, rotasi, mutasi dan promosi. - Penerapan sistem merit secara keseluruhan belum berjalan dengan maksimal ssalah satunya karena belum dilakukan assesment kepada seluruh pegawai dan belum ada pemanfaatannya kepada pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta sistem reward dan punishment berdasarkan hasil kinerja 	Memadai		Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - pada komponen pengukuran kinerja: IKU di level Pemda dan Perangkat daerah belum dipublikasi, baru sebagian perangkat daerah yang memanfaatkan monev pada e-sakip sebagai bagian dari dialog kinerja khususnya pada pencapaian kinerja yang belum sesuai target, serta belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam pengembangan kompetensi, rotasi, mutasi dan promosi. - Penerapan sistem merit secara keseluruhan belum berjalan dengan maksimal ssalah satunya karena belum dilakukan assesment kepada seluruh pegawai dan belum ada pemanfaatannya kepada pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta sistem reward dan punishment berdasarkan hasil kinerja

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Kurang Memadai	- Peran APIP sebagai quality assurance and consulting belum optimal, hal tersebut terlihat pada level Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2	Memadai		Kurang Memadai	- Peran APIP sebagai quality assurance and consulting belum optimal, hal tersebut terlihat pada level Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai	-- - pada komponen pelaporan kinerja: laporan kinerja belum menyampaikan perbandingan data kinerja dengan target nasional, belum menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan jangka menengah dan analisis faktor pendukung atau penghambat keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja serta solusi yang dilakukan.	Memadai		Memadai	-- - pada komponen pelaporan kinerja: laporan kinerja belum menyampaikan perbandingan data kinerja dengan target nasional, belum menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan jangka menengah dan analisis faktor pendukung atau penghambat keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja serta solusi yang dilakukan.

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026, dikarenakan masa jabatan Bupati Banyumas sudah selesai dan pemilihan kepala daerah baru dilakukan pada tahun 2024 sehingga Kabupaten Banyumas dipimpin oleh pejabat Bupati dan tidak memiliki visi misi daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 memiliki 4 tujuan dengan 7 indikator tujuan yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun. Di mana tujuan tersebut didukung dengan sasaran dan indikator sasaran daerah sebanyak 26 indikator. Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Banyumas diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran			Indikator Tujuan, Indikator Sasaran	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing			1	Indeks Reformasi Birokrasi	
		1	1.1	Mewujudkan ASN yang Profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN
		2	1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
		3	1.3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	3	Nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi
					4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
					5	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
					6	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah
	7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
		4	2.1	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah	8	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
					3	Indeks Daya Saing Daerah
		5	2.2	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	9	Angka Kriminalitas
		6	2.3	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	10	Indeks Daya Saing Infrastruktur
	7	2.4	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan, Indikator Sasaran
			dan menurunkan risiko bencana	12 Indeks Risiko Bencana (IRB)
		8	2.5 Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi	13 Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi pada IDSD
				4 Angka Kemiskinan
		9	3.1 Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	14 Indeks Kedalaman Kemiskinan
				5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		10	3.2 Meningkatkan kesempatan kerja	15 Tingkat Kesempatan Kerja
			3.3 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	16 Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA
				6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		12	3.4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	17 Usia Harapan Hidup (UHH)
		13	3.5 Meningkatkan derajat pendidikan	18 Harapan Lama Sekolah
		14	3.6 Meningkatkan Literasi Masyarakat	19 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
		15	3.7 Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk	20 Laju Pertumbuhan Penduduk
		16	3.8 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	21 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
				22 Nilai Kota Layak Anak
		17	3.9 Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda	23 Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan
				7 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
		18	4.1 Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri	24 Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP
		19	4.2 Meningkatkan keterjangkauan pangan	25 Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP
		20	4.3 Mengoptimalkan pemanfaatan pangan	26 Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP

Sumber: Dokumen RPD Tahun 2024-2026, 2023

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMKAB
KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026	
Sumber Data	: RPD 2024-2026	
Tujuan Strategis RPD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing
Nama Dinas Terkait Tujuan 1	DINPERTAN KP	
	DINPERINDAG	
	DINKANNAK	
	DPU	
Nama Dinas Terkait Tujuan 2	DPPKBP3A	
	DPMPSTP	
	DINSOSPERMASDES	
	DINAKERKOP UKM	
	RSUD BANYUMAS	
	DINDIK	
	DINARPUEDA	
	RSUD AJIBARANG	
	DINKES	
	DINPORABUDPAR	
DINPERKIM		
Nama Dinas Terkait Tujuan 3	DLH	
	BAPPEDA LITBANG	
	DPU	
	DINPERINDAG	
	DINPERTAN KP	
	DINPORABUDPAR	
	KESBANGPOL	
	DINAKERKOP UKM	
	DINHUB	
	DINPERKIM	
	SATPOL PP	
	BPBD	
DINKANNAK		
Nama Dinas Terkait Tujuan 4	SETWAN	
	BAPPEDA LITBANG	

	DINKOMINFO	
	DINDUKCAPIL	
	DPMPSTP	
	DINSOSPERMASDES	
	INSPEKTORAT	
	SETDA	
	BKPSDM	
	BKAD	
	DINARPUSDA	
	BAPENDA	
	KEC. AJIBARANG	
	KEC. BANYUMAS	
	KEC. BATURRADEN	
	KEC. CILONGOK	
	KEC. GUMELAR	
	KEC. JATILAWANG	
	KEC. KALIBAGOR	
	KEC. KARANGLEWAS	
	KEC. KEBASEN	
	KEC. KEDUNGBANTENG	
	KEC. KEMBARAN	
	KEC. KEMRANJEN	
	KEC. LUMBIR	
	KEC. PATIKRAJA	
	KEC. PEKUNCEN	
	KEC. PURWOJATI	
	KEC. PWT BARAT	
	KEC. PWT TIMUR	
	KEC. PWT SELATAN	
	KEC. PWT UTARA	
	KEC. RAWALO	
	KEC. SOKARAJA	
	KEC. SOMAGEDE	
	KEC. SUMBANG	
	KEC. SUMPIUH	
	KEC. TAMBAK	
	KEC. WANGON	
Sasaran Strategis RPD	Sasaran 1.1	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan
	Sasaran 1.2	Meningkatkan keterjangkauan pangan
	Sasaran 1.3	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri
	Sasaran 2.1	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk
	Sasaran 2.2	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
	Sasaran 2.3	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat
	Sasaran 2.5	Meningkatkan derajat pendidikan
	Sasaran 2.6	Meningkatkan kesempatan kerja
	Sasaran 2.7	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja

	Sasaran 2.9	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
	Sasaran 2.10	Meningkatkan Literasi Masyarakat
	Sasaran 2.11	Meningkatnya kapabilitas dan daya saing Pemuda
	Sasaran 3.1	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
	Sasaran 3.2	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi
	Sasaran 3.4	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana
	Sasaran 3.5	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
	Sasaran 3.6	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah
	Sasaran 4.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	Sasaran 4.2	Mewujudkan ASN yang Profesional
	Sasaran 4.7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif
Indikator Kinerja Sasaran RPD	1.	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP : 79.14 Nilai
	2.	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP : 81.48 Nilai
	3.	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP : 83.43 Nilai
	4.	Laju Pertumbuhan Penduduk : 1.36 %
	5.	Indek Kedalaman Kemiskinan : 1.35 Indeks
	6.	Usia Harapan Hidup UHH : 73.96 Tahun
	7.	Harapan Lama Sekolah : 13.40 Tahun
	8.	Rata rata lama sekolah : 7.94 Tahun
	9.	Tingkat Kesempatan Kerja : 94.15 %
	10.	Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA : 93.53 %
	11.	Indek Pembangunan Gender IPG : 89.45 Indeks
	12.	Nilai Kota Layak Anak : 600 Nilai
	13.	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM : 38 Indeks
	14.	Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan : 0.60 %
	15.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB : 48330 Milyar Rupiah
	16.	Indeks Pilar kapabilitas inovasi pada IDSD : 2.95 Indeks
	17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH : 64.20 Indeks
	18.	Indeks Resiko Bencana IRB : 152 Indeks
	19.	Indek daya saing infrastruktur : 3.42 Indeks
	20.	Angka Kriminalitas : 1.48 Angka
	21.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP : 4.57 Indeks
	22.	Indeks Profesionalitas ASN : 71 Indeks
	23.	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah : 100 %
	24.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE : 3.3 Indeks
	25.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP : 79 Nilai

	26. Nilai Komponen Hasil Indek Reformasi Birokrasi : 33.05 Nilai
	27. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP : 3.050
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>Tujuan 1</u> Memperkuat Ketahanan Pangan
	<u>Tujuan 2</u> Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM
	<u>Tujuan 3</u> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
	<u>Tujuan 4</u> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing
	<u>Sasaran 1.1.</u> Mengoptimalkan pemanfaatan pangan
	<u>Sasaran 1.2</u> Meningkatkan keterjangkauan pangan
	<u>Sasaran 1.3</u> Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri
	<u>Sasaran 2.1</u> Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk
	<u>Sasaran 2.2</u> Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
	<u>Sasaran 2.3</u> Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat
	<u>Sasaran 2.4</u> Meningkatkan derajat pendidikan
	<u>Sasaran 2.5</u> Meningkatkan kesempatan kerja
	<u>Sasaran 2.6</u> Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
	<u>Sasaran 2.7</u> Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
	<u>Sasaran 2.8</u> Meningkatkan Literasi Masyarakat
	<u>Sasaran 2.9</u> Meningkatnya kapabilitas dan daya saing Pemuda
	<u>Sasaran 3.1</u> Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
	<u>Sasaran 3.2</u> Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi
	<u>Sasaran 3.3</u> Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana
	<u>Sasaran 3.4</u> Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
	<u>Sasaran 3.5</u> Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah
	<u>Sasaran 4.1</u> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	<u>Sasaran 4.2</u> Mewujudkan ASN yang Profesional
	<u>Sasaran 4.3</u> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif
	<u>Indikator 1.1.1</u> Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP
	<u>Indikator 1.2.1</u> Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP
	<u>Indikator 1.3.1</u> Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP
	<u>Indikator 2.1.1</u> Laju Pertumbuhan Penduduk
	<u>Indikator 2.2.1</u> Indek Kedalaman Kemiskinan
	<u>Indikator 2.3.1</u> Usia Harapan Hidup UHH
	<u>Indikator 2.4.1</u> Harapan Lama Sekolah
	<u>Indikator 2.4.2</u> Rata rata lama sekolah
<u>Indikator 2.5.1</u> Tingkat Kesempatan Kerja	
<u>Indikator 2.6.1</u> Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA	
<u>Indikator 2.7.1</u> Indek Pembangunan Gender IPG	
<u>Indikator 2.7.2</u> Nilai Kota Layak Anak	
<u>Indikator 2.8.1</u> Indek Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM	

	<u>Indikator 2.9.1</u> Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan
	<u>Indikator 3.1.1</u> Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB
	<u>Indikator 3.2.1</u> Indeks Pilar kapabilitas inovasi pada IDSD
	<u>Indikator 3.3.1</u> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH
	<u>Indikator 3.3.2</u> Indeks Resiko Bencana IRB
	<u>Indikator 3.4.1</u> Indeks daya saing infrastruktur
	<u>Indikator 3.5.1</u> Angka Kriminalitas
	<u>Indikator 4.1.1</u> Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP
	<u>Indikator 4.2.1</u> Indeks Profesionalitas ASN
	<u>Indikator 4.3.1</u> Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah
	<u>Indikator 4.3.2</u> Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE
	<u>Indikator 4.3.3</u> Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP
	<u>Indikator 4.3.4</u> Nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi
	<u>Indikator 4.3.5</u> Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Rincian identifikasi risiko dapat dilihat sebagai berikut:

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMKAB

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2024-2026		
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026		
Sumber Data	: RPD 2024-2026		
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan	
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing	

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing										
	1 Mewujudkan ASN yang Profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan	Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Internal	C	Belum optimalnya pencapaian kinerja organisasi yang efektif dan efisien, kurang profesionalnya birokrasi pelayanan, dan menghambatnya pencapaian perencanaan pembangunan daerah yang strategis	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	BKPSDM
	2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP	Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Kepala Daerah	Kebijakan pelayanan publik belum sepenuhnya mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINDUKCAPIL
	3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	3	Nilai Sistem Akuntabilitas	Perencanaan, pengukuran dan	Kepala Daerah	Masih belum efektifnya Implementasi Kebijakan	Internal	C	Tidak tercapainya tujuan strategis pemda;	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait	BKPSDM

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
	yang Efektif dan Kolaboratif		Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	pelaporan kinerja belum efektif mendukung kinerja Pemkab		Pemkab terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja				3. Masyarakat	
		4	Nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi	Kepala Daerah	Kurangnya komitmen dan pemahaman semua Pimpinan OPD untuk mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi	Internal	C	Menurunnya kinerja Reformasi Birokrasi	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	SETDA
		5	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Belum efektifnya pengelolaan risiko dan audit kinerja dalam upaya untuk pengendalian dan pencapaian tujuan pemkab	Kepala Daerah	Kebijakan yang ada belum efektif dalam pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan Pemkab	Internal	C	Tidak tercapainya tujuan strategis pemda	1. Kepala daerah 2. OPD terkait	INSPEKTORAT
		6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Internal	C	Munculnya permasalahan berupa risiko negatif yang tidak teridentifikasi dengan baik sehingga menghambat pencapaian tujuan	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	SETDA
				Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab	Kepala Daerah	Belum memiliki kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Internal	C	Sistem informasi belum efektif memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pemerintahan	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	SETDA
		7	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah kurang akuntabel	Kepala Daerah	Belum efektifnya implementasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah	Internal	C	Menurunnya akuntabilitas laporan keuangan daerah	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	BKAD
2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM										
	4 Meningkatkan kesempatan kerja	8	Tingkat Kesempatan Kerja	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri	Kepala Daerah	belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan usaha	Internal	C	Meningkatnya pengangguran	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINAKERKOP UKM

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
				Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia	Kepala Daerah	Kurangnya kerjasama dengan dunia usaha dalam penjangkaran tenaga kerja	Internal	C	Meningkatnya pengangguran	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINAKERKOP UKM
5	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	9	Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha	Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong pendidikan sekolah menengah dan sarjana memberikan pendidikan atau keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha	Internal	C	Meningkatnya pengangguran	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINAKERKOP UKM
6	Meningkatkan derajat pendidikan	10	Harapan Lama Sekolah	Adanya Pernikahan usia dini	Kepala Daerah	Implementasi kebijakan Wajar Dikdas belum optimal	Internal	C	Meningkatnya Anak Putus Sekolah	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINDIK
7	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	11	Nilai Kota Layak Anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas	Kepala Daerah	Belum tersusunnya RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Internal	C	Belum optimalnya tumbuh kembang anak	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DPPKBP3A
		12	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Daerah	Kurangnya sinergitas lintas sektoral untuk mendukung Program pemberdayaan perempuan dan Belum efektifnya kelembagaan PUG	Internal	C	Menurunnya daya saing perempuan	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DPPKBP3A
8	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	13	Usia Harapan Hidup (UHH)	belum optimalnya standar kesehatan Keluarga khususnya kesehatan Ibu dan anak	Kepala Daerah	Belum sinerginya program lintas sekorak yang mendukung keluarga sehat khususnya kesehatan ibu dan anak	Internal	C	Menurunnya Kualitas kesehatan keluarga serta Tingginya AKI dan AKB	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINKES
9	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk	14	Laju Pertumbuhan Penduduk	Belum efektifnya implementasi program pengendalian penduduk	Kepala Daerah	Belum adanya GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Internal	C	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DPPKBP3A
10	Meningkatnya kapabilitas dan daya saing Pemuda	15	Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Belum sinerginya pembangunan pemuda	Kepala Daerah	Belum adanya RAD Pelayanan Kepemudaan	Internal	C	Kurangnya kapabilitas dan daya saing pemuda	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINPORABUD PAR
11	Meningkatkan Literasi Masyarakat	16	Indeks Pembangunan Literasi	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat	Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong budaya literasi masyarakat	Internal	C	Menurunnya daya saing anak	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINARPUSSA

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
			Masyarakat (IPLM)								
12	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	17	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Masih belum cukupnya upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Kepala Daerah	Bantuan untuk masyarakat miskin belum tepat sasaran	Internal	C	Masih tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINSOSPERM ASDES, DINPERKIM
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah										
13	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	18	Angka Kriminalitas	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat	Kepala Daerah	Kurangnya penegakan Perda	Internal	C	Munculnya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	SATPOL PP
14	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	19	Indek daya saing infrastruktur	Belum meratanya pelayanan transportasi di semua wilayah	Kepala Daerah	Belum ada Rencana Induk Jaringan Jalan	Internal	C	Masih adanya wilayah yang belum terlayani transportasi	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DINHUB
				Menurunnya ketahanan infrastruktur	Kepala Daerah	Adanya perubahan iklim dan bencana alam	Eksternal	UC	Terhambatnya akses kegiatan ekonomi masyarakat	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DPU
					Kualitas infrastruktur tidak sesuai standar	Kepala Daerah		Internal	C	Terhambatnya akses kegiatan ekonomi masyarakat	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat
15	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana	20	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Kepala Daerah	Belum semua jenis bencana memiliki Dokumen rencana kontijensi	Internal	C	Potensi kerugian akibat bencana bertambah	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	BPBD
		21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Masih rendahnya kualitas air	Kepala Daerah	Belum efektifnya kelembagaan yang menangani SDA	Internal	C	Kerusakan lingkungan hidup	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	DLH
16	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi	22	Indeks Pilar kapabilitas inovasi pada (IDSD)	Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah	Kepala Daerah	Belum tersusunnya roadmap SIDA	Internal	C	Kurangnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	BAPPEDA LITBANG
				Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)	Kepala Daerah	Belum terbentuk Klinik Kekayaan Intelektual	Internal	C	Tidak terlayannya Kekayaan intelektual masyarakat	1. Kepala Daerah 2. OPD terkait 3. Masyarakat	BAPPEDA LITBANG

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
17	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	23	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Masih kurangnya kuantitas ekspor dan nilai tambah produk unggulan	Kepala Daerah	Belum efektifnya kelembagaan yang memfasilitasi ekspor	Internal	C	Tidak meningkatnya nilai PDRB	1. Pemerintah daerah 2. Industri kecil	DINPERINDAG
4	Memperkuat Ketahanan Pangan										
18	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri	24	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi	Kepala Daerah	Kebijakan Perlindungan Lahan Pangan dan Pertanian berkelanjutan belum ditetapkan	Internal	C	Berkurangnya ketersediaan pangan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan	1. Pemerintah 2. OPD terkait 3. Petani 4. Masyarakat	DINPERTAN KP, DINKANNAK
				Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah	Kepala Daerah	Belum adanya dokumen rencana pangan	Internal	C	tidak terpenuhinya cadangan pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan	1. Pemerintah 2. OPD terkait 3. Petani 4. Masyarakat	DINPERTAN KP, DINKANNAK
19	Meningkatkan keterjangkauan pangan	25	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP	Masih adanya daerah rawan pangan	Kepala Daerah	Kurangnya sinkronisasi program dan kebijakan yang mengintervensi stakeholder terkait keterjangkauan pangan sesuai dengan kewenangan	Internal	C	tidak meratanya pangan dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan	1. Pemerintah 2. OPD terkait 3. Petani 4. Masyarakat	DINPERTAN KP
20	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan	26	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP	Kurangnya minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal	Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Internal	C	Belum idealnya pola konsumsi pangan masyarakat	1. Kepala daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Petani 4. Masyarakat	DINPERTAN KP

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas :

Form 4

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
		RSP.24						
1	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan	RSP.24	503	1	57	3.4	3.2	10.88
2	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas	RSP.24	208	1	15	3.4	3.0	10.2
3	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan	RSP.24	208	1	15	3.0	2.8	8.4
4	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat	RSP.24	105	1	10	3.8	3.5	13.3
5	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	RSP.24	105	1	8	3.8	3.4	12.92
6	Masih rendahnya kualitas air	RSP.24	211	1	13	3.8	3.3	12.54
7	belum optimalnya standar kesehatan Keluarga khususnya kesehatan Ibu dan anak	RSP.24	102	1	3	4.1	3.8	15.58
8	Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	RSP.24	212	1	14	3.8	3.2	12.16
9	Belum efektifnya implementasi program pengendalian penduduk	RSP.24	214	1	15	3.0	3.0	9
10	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat	RSP.24	223	1	20	3.2	3.2	10.24
11	Masih kurangnya kuantitas ekspor dan nilai tambah produk unggulan	RSP.24	330	1	23	3.6	3.4	12.24
12	Belum meratanya pelayanan transportasi di semua wilayah	RSP.24	215	1	16	3.8	3.6	13.68
13	Menurunnya ketahanan infrastruktur	RSP.24	103	1	6	3.9	3.5	13.65
14	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi	RSP.24	327	1	22	3.9	3.8	14.82
15	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah	RSP.24	327	1	22	3.1	2.9	8.99
16	Masih adanya daerah rawan pangan	RSP.24	209	1	22	3.4	2.9	9.86
17	Kurangnya minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal	RSP.24	209	1	22	2.9	3.2	9.28
18	Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja belum efektif mendukung kinerja Pemkab	RSP.24	401	1	24	3.7	3.2	11.84
19	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi	RSP.24	401	1	24	3.3	3.3	10.89
20	Belum efektifnya pengelolaan risiko dan audit kinerja dalam upaya untuk pengendalian dan pencapaian tujuan pemkab	RSP.24	601	1	26	3.7	3.3	12.21

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
		RSP.24	401	1	24			
21	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE	RSP.24	401	1	24	3.1	2.9	8.99
22	Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab	RSP.24	401	1	24	3.2	3.0	9.6
23	Pengelolaan keuangan daerah kurang akuntabel	RSP.24	502	1	56	3.9	2.9	11.31
24	Belum sinerginya pembangunan pemuda	RSP.24	219	1	19	3.1	3.0	9.3
25	Masih belum cukupnya upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	RSP.24	106	1	11	4.3	3.6	15.48
26	Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah	RSP.24	505	1	54	2.9	2.9	8.41
27	Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)	RSP.24	505	1	54	2.8	2.9	8.12
28	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri	RSP.24	217	1	12	4.0	3.8	15.2
29	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia	RSP.24	207	1	12	4.3	4.0	17.2
30	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha	RSP.24	207	1	12	4.2	4.1	17.22
31	adanya pernikahan usia dini	RSP.24	101	1	2	4.0	3.8	15.2

DATA KORESPONDEN

R1. PEMKAB
R2. DINDIK
R3. DINKES
R4. RSUD BANYUMAS
R5. RSUD AJIBARANG
R6. DPU
R7. DINPERKIM

R8. BPBD
R9. BAKESBANGPOL
R10. SATPOL PP
R11. DINSOSPERMASDES
R12. DINAKERKOP UKM
R13. DLH
R14. DINDUKCAPIL

R15. DPPKBP3A
R16. DINHUB
R17. DINKOMINFO
R18. DPMPTSP
R19. DINPORABUDPAR
R20. DINARPUSDA
R21. DINKANNAK

R22. DINPERTAN KP
R23. DINPERINDAG
R24. SETDA
R25. SETWAN
R26. INSPEKTORAT
R27. BAPPEDALITBANG
R28. BAPENDA
R29. BKAD
R30. BKPSDM

HASIL KUESIONER SKALA DAMPAK

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak																								Skor Skala Rata-rata					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29
1	Kurangnya minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal	RSP.24	209	1	22	2	2	2	3	4	3	3	2	4	3	4	4	2	4	4	3	3	2	4	4	2	4	2	1	2	3	3	3	2	2.9
2	Masih kurangnya kuantitas ekspor dan nilai tambah produk unggulan	RSP.24	330	1	23	3	3	2	4	4	4	4	3	4	3	5	4	2	4	4	5	3	3	3	5	4	3	3	2	4	3	4	4	4	3.55
3	Belum efektifnya implementasi program pengendalian penduduk	RSP.24	214	1	15	2	2	4	2	3	3	3	3	4	3	5	4	2	4	3	3	4	3	3	4	2	3	2	2	3	3	3	4	2	3.03
4	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	RSP.24	105	1	8	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	5	4	2	4	5	5	4	3	4	4	2	4	3	2	5	5	4	4	3	3.83
5	Masih adanya daerah rawan pangan	RSP.24	209	1	22	2	3	3	2	2	5	3	3	5	4	4	5	2	4	5	4	4	3	4	5	2	4	3	2	3	5	3	3	2	3.41
6	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan	RSP.24	208	1	15	2	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	4	2	4	4	3	2	4	4	4	2	4	3	2	2	3	3	3	2	2.97
7	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas	RSP.24	208	1	15	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3.45
8	Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	RSP.24	212	1	14	4	3	4	4	4	5	5	4	5	3	5	5	2	4	5	4	3	3	4	4	4	3	2	2	4	3	5	3	4	3.79
9	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat	RSP.24	105	1	10	4	3	4	4	3	5	5	4	4	3	5	3	2	4	5	5	4	4	4	5	3	4	2	2	4	3	5	3	3	3.76
10	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan	RSP.24	503	1	57	4	3	3	4	2	4	4	3	5	3	4	5	2	4	5	4	3	2	4	4	3	3	2	2	4	3	4	3	3	3.41
11	Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja belum efektif mendukung kinerja Pemkab	RSP.24	401	1	24	4	3	4	4	3	5	5	4	4	3	4	4	2	4	5	4	4	3	3	5	3	3	4	3	4	3	4	2	3	3.66

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak																								Skor Skala Rata-rata						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	
12	Belum efektifnya pengelolaan risiko dan audit kinerja dalam upaya untuk pengendalian dan pencapaian tujuan pemkab	RSP.24	601	1	26	4	3	2	4	4	5	5	4	5	3	4	4	2	4	5	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3.69			
13	Masih rendahnya kualitas air	RSP.24	211	1	13	4	3	4	4	4	5	4	4	5	3	4	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	3	2	5	4	4	3	3	3.76	
14	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi	RSP.24	327	1	22	4	3	4	4	5	5	5	4	5	3	4	5	2	4	4	5	4	3	3	5	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3.9	
15	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah	RSP.24	327	1	22	2	2	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	2	4	4	4	3	3	4	4	2	3	3	2	2	4	3	3	2	3.1	
16	Menurunnya ketahanan infrastruktur	RSP.24	103	1	6	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	2	4	5	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	5	3	4	3.93	
17	Belum meratanya pelayanan transportasi di semua wilayah	RSP.24	215	1	16	4	4	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	2	4	5	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3.79	
18	Belum sinerginya pembangunan pemuda	RSP.24	219	1	19	2	3	2	3	4	3	3	3	5	3	3	4	2	4	5	4	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	3	4	2	3.1	
19	Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab	RSP.24	401	1	24	3	3	2	3	3	3	3	3	5	3	3	5	2	4	5	4	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3.17	
20	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE	RSP.24	401	1	24	3	3	2	3	3	3	3	3	5	3	3	4	2	2	4	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.07	
21	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi	RSP.24	401	1	24	3	4	2	4	3	4	4	3	5	4	3	5	2	4	5	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3.34	
22	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat	RSP.24	223	1	20	2	3	2	3	4	3	3	3	4	4	3	5	2	3	4	5	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3.24
23	Pengelolaan keuangan daerah kurang akuntabel	RSP.24	502	1	56	3	4	4	4	2	5	5	3	5	4	4	5	2	4	5	5	3	2	4	5	4	3	5	3	4	4	4	4	3	3.86	
24	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia	RSP.24	207	1	12	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	2	4	4	5	5	2	4	4	5	4	5	3	4	5	5	4	4	4.34	

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak																								Skor Skala Rata-rata						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	
25	Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)	RSP.24	505	1	54	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2.83	
26	Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah	RSP.24	505	1	54	2	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2.93	
27	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri	RSP.24	217	1	12	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	2	4	3	4	5	2	4	4	4	3	4	2	4	3	5	3	4	3.97	
28	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha	RSP.24	207	1	12	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5	2	5	3	5	3	4	4.21	
29	belum optimalnya standar kesehatan Keluarga khususnya kesehatan Ibu dan anak	RSP.24	102	1	3	4	5	2	5	4	5	5	4	4	5	5	5	2	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	2	5	3	5	3	4	4.1	
30	Masih belum cukupnya upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	RSP.24	106	1	11	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	2	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4	3	5	3	5	3	5	4.31	
31	adanya pernikahan usia dini	RSP.24	101	1	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	5	4	5	4

CATATAN KODE SKALA

- | | | | |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1. DPMPTSP | 8. SATPOL PP | 15. DPU | 22. DINAKERKOP UKM |
| 2. SETDA | 9. DINKOMINFO | 16. DPPKBP3A | 23. RSUD AJIBARANG |
| 3. DINPERINDAG | 10. DINSOSPERMASDES | 17. DINPERTAN KP | 24. DINSOSPERMASDES |
| 4. BPBD | 11. DINARPUSDA | 18. SETWAN | 25. DINKES |
| 5. RSUD BANYUMAS | 12. DINDUKCAPIL | 19. BKPSDM | 26. DLH |
| 6. DINPERKIM | 13. BAPPEDALITBANG | 20. BKAD | 27. DINKANNAK |
| 7. BAPENDA | 14. KESBANGPOL | 21. DINHB | 28. INSPEKTORAT |
| | | | 29. DINPORABUDPAR |

HASIL KUESIONER SKALA KEMUNGKINAN

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak																													Skor Skala Rata-rata	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	Kurangnya minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal	RSP.24	209	1	22	3	1	4	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	5	3	4	4	4	4	3	5	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3.21
2	Masih kurangnya kuantitas ekspor dan nilai tambah produk unggulan	RSP.24	330	1	23	4	1	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	2	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3.45
3	Belum efektifnya implementasi program pengendalian penduduk	RSP.24	214	1	15	3	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	5	4	4	4	3	4	2	2	3	3	2	2	2	3	3	
4	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	RSP.24	105	1	8	4	2	3	4	2	3	4	4	3	4	2	4	3	3	3	5	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	2	3	4	3.38	
5	Masih adanya daerah rawan pangan	RSP.24	209	1	22	3	2	3	3	2	3	3	3	2	4	2	2	2	3	4	4	4	3	3	4	3	2	3	4	3	2	2	3	3	2.9	
6	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan	RSP.24	208	1	15	3	2	3	2	2	3	3	3	2	4	3	2	2	2	4	5	4	4	3	3	3	2	2	4	3	2	2	2	3	2.83	
7	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas	RSP.24	208	1	15	4	2	3	3	2	3	4	3	2	4	3	3	1	3	3	5	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	2	3	3	3	
8	Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	RSP.24	212	1	14	4	1	3	4	2	3	4	4	3	4	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3.24	
9	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat	RSP.24	105	1	10	3	1	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	3	3	4	3.52	
10	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan	RSP.24	503	1	57	4	1	3	4	2	3	4	4	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3.24	
11	Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja belum efektif mendukung kinerja Pemkab	RSP.24	401	1	24	4	1	2	4	1	3	4	4	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	5	3.24	

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak																													Skor Skala Rata-rata	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
12	Belum efektifnya pengelolaan risiko dan audit kinerja dalam upaya untuk pengendalian dan pencapaian tujuan pemkab	RSP.24	601	1	26	4	1	2	4	2	4	4	4	2	4	4	3	3	3	3	4	2	3	4	4	4	3	4	4	3	3	5	3.34			
13	Masih rendahnya kualitas air	RSP.24	211	1	13	4	1	2	4	2	3	4	4	2	4	4	3	2	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3.34			
14	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi	RSP.24	327	1	22	4	1	3	4	4	4	4	4	2	4	5	4	2	4	2	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4	3	5	3.76	
15	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah	RSP.24	327	1	22	3	1	2	3	2	3	3	3	3	4	3	2	2	3	2	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	2	3	3	2.93	
16	Menurunnya ketahanan infrastruktur	RSP.24	103	1	6	4	1	3	4	1	3	4	4	2	4	5	4	2	4	3	4	4	3	4	3	5	3	4	3	4	4	4	4	5	3.52	
17	Belum meratanya pelayanan transportasi di semua wilayah	RSP.24	215	1	16	4	1	2	4	2	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	5	3	4	3	5	4	4	3	4	4	4	3	5	3.59	
18	Belum sinerginya pembangunan pemuda	RSP.24	219	1	19	3	2	2	3	2	3	4	3	3	4	3	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	2	3	3	
19	Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab	RSP.24	401	1	24	3	2	3	3	1	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	3	3		
20	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE	RSP.24	401	1	24	3	2	2	3	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	5	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	3	2.93
21	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi	RSP.24	401	1	24	3	2	3	4	1	3	4	4	2	4	4	3	2	3	3	3	5	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3.28	
22	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat	RSP.24	223	1	20	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	5	3	3	4	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3.24	
23	Pengelolaan keuangan daerah kurang akuntabel	RSP.24	502	1	56	3	2	2	3	1	3	4	4	1	4	3	3	3	3	3	3	4	2	4	2	3	3	4	2	3	3	3	3	4	2.93	
24	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia	RSP.24	207	1	12	4	2	3	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	5	5	4	4	3	4	4	5	4.03	

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak																													Skor Skala Rata-rata
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
25	Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)	RSP.24	505	1	54	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	2.9	
26	Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah	RSP.24	505	1	54	3	2	2	3	1	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	2.9	
27	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri	RSP.24	217	1	12	4	2	2	5	2	3	5	5	3	4	4	4	3	5	3	4	4	3	5	4	5	3	4	3	4	4	4	5	3.79	
28	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha	RSP.24	207	1	12	4	2	3	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	3	4	4	3	5	4	5	3	4	3	4	4	4	5	4.07	
29	belum optimalnya standar kesehatan Keluarga khususnya kesehatan Ibu dan anak	RSP.24	102	1	3	4	2	3	4	2	4	4	4	5	3	4	4	4	3	5	3	4	4	3	5	3	4	4	3	4	4	4	5	3.76	
30	Masih belum cukupnya upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	RSP.24	106	1	11	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	3.62
31	adanya pernikahan usia dini	RSP.24	101	1	2	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	3	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	3.79

CATATAN KODE SKALA

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1. DINPERKIM | 8. SATPOL PP | 15. SETWAN | R22. RSUD AJIBARANG |
| 2. DINDIK | 9. INSPEKTORAT | 16. BKPSDM | R23. BPBD |
| 3. DINAKERKOP UKM | 10. KESBANGPOL | 17. DINKOMINFO | R24. DLH |
| 4. BAPENDA | 11. DINDUKCAPIL | 18. BKAD | R25. RSUD BANYUMAS |
| 5. DINPERINDAG | 12. DPMPTSP | 19. DINARPUSDA | R26. DINKES |
| 6. BAPPEDALITBANG | 13. DINSOSPERMASDES | 20. DPPKBP3A | R27. DINHUB |
| 7. DINKANNAK | 14. DINPERTAN KP | 21. DPU | R28. SETDA |
| | | | R29. DINPORABUDPAR |

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2024-2026		
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026		
Sumber Data	: RPD 2024-2026		
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan	
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing	

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan	RSP.24	503	1	57	10.88	BKPSDM	Belum adanya kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Belum optimalnya pencapaian kinerja organisasi yang efektif dan efisien, kurang profesionalnya birokrasi pelayanan, dan menghambatnya pencapaian perencanaan pembangunan daerah yang strategis
2	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas	RSP.24	208	1	15	10.2	DPPKBP3A	Belum tersusunnya RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Belum optimalnya tumbuh kembang anak
3	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan	RSP.24	208	1	15	8.4	DPPKBP3A	Kurangnya sinergitas lintas sektoral untuk mendukung Program pemberdayaan perempuan dan Belum efektifnya kelembagaan PUG	Menurunnya daya saing perempuan
4	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat	RSP.24	105	1	10	13.3	SATPOL PP	Kurangnya penegakan Perda	Munculnya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	RSP.24	105	1	8	12.92	BPBD	Belum semua jenis bencana memiliki Dokumen rencana kontijensi	Potensi kerugian akibat bencana bertambah
6	Masih rendahnya kualitas air	RSP.24	211	1	13	12.54	DLH	Belum efektifnya kelembagaan yang menangani SDA	Kerusakan lingkungan hidup
7	belum optimalnya standar kesehatan Keluarga khususnya kesehatan Ibu dan anak	RSP.24	102	1	3	15.58	DINKES	Belum sinerginya program lintas sektoral yang mendukung keluarga sehat khususnya kesehatan ibu dan anak	Menurunnya Kualitas kesehatan keluarga serta Tingginya AKI dan AKB

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
8	Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	RSP.24	212	1	14	12.16	DINDUKCAPIL	Kebijakan pelayanan publik belum sepenuhnya mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
9	Belum efektifnya implementasi program pengendalian penduduk	RSP.24	214	1	15	9	DPPKBP3A	Belum adanya GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali
10	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat	RSP.24	223	1	20	10.24	DINARPUSDA	Belum adanya kebijakan yang mendorong budaya literasi masyarakat	Menurunnya daya saing anak
11	Masih kurangnya kuantitas ekspor dan nilai tambah produk unggulan	RSP.24	330	1	23	12.24	DINPERINDAG	Belum efektifnya kelembagaan yang memfasilitasi ekspor	Tidak meningkatnya nilai PDRB
12	Belum meratanya pelayanan transportasi di semua wilayah	RSP.24	215	1	16	13.68	DINHUB	Belum ada Rencana Induk Jaringan Jalan	Masih adanya wilayah yang belum terlayani transportasi
13	Menurunnya ketahanan infrastruktur	RSP.24	103	1	6	13.65	DPU	Adanya perubahan iklim dan bencana alam	Terhambatnya akses kegiatan ekonomi masyarakat
								Kualitas infrastruktur tidak sesuai standar	Terhambatnya akses kegiatan ekonomi masyarakat
14	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi	RSP.24	327	1	22	14.82	DINPERTAN KP	Kebijakan Perlindungan Lahan Pangan dan Pertanian berkelanjutan belum ditetapkan	Berkurangnya ketersediaan pangan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan
15	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah	RSP.24	327	1	22	8.99	DINPERTAN KP	Belum adanya dokumen rencana pangan	tidak terpenuhinya cadangan pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan
16	Masih adanya daerah rawan pangan	RSP.24	209	1	22	9.86	DINPERTAN KP	Kurangnya sinkronisasi program dan kebijakan yang mengintervensi stakeholder terkait keterjangkauan pangan sesuai dengan kewenangan	tidak meratanya pangan dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan
17	Kurangnya minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal	RSP.24	209	1	22	9.28	DINPERTAN KP	Belum adanya kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Belum idealnya pola konsumsi pangan masyarakat
18	Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja belum efektif mendukung kinerja Pemkab	RSP.24	401	1	24	11.84	SETDA	Masih belum efektifnya Implementasi Kebijakan Pemkab terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Tidak tercapainya tujuan strategis pemda;

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
19	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi	RSP.24	401	1	24	10.89	SETDA	Kurangnya komitmen dan pemahaman semua Pimpinan OPD untuk mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi	Menurunnya kinerja Reformasi Birokrasi
20	Belum efektifnya pengelolaan risiko dan audit kinerja dalam upaya untuk pengendalian dan pencapaian tujuan pemkab	RSP.24	601	1	26	12.21	INSPEKTORAT	Kebijakan yang ada belum efektif dalam pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan Pemkab	Tidak tercapainya tujuan strategis pemda
21	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE	RSP.24	401	1	24	8.99	SETDA	Belum adanya kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Munculnya permasalahan berupa risiko negatif yang tidak teridentifikasi dengan baik sehingga menghambat pencapaian tujuan
22	Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab	RSP.24	401	1	24	9.6	SETDA	Belum memiliki kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Sistem informasi belum efektif memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pemerintahan
23	Pengelolaan keuangan daerah kurang akuntabel	RSP.24	502	1	56	11.31	BKAD	Belum efektifnya implementasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah	Menurunnya akuntabilitas laporan keuangan daerah
24	Belum sinerginya pembangunan pemuda	RSP.24	219	1	19	9.3	DINPORABUDPAR	Belum adanya RAD Pelayanan Kepemudaan	Kurangnya kapabilitas dan daya saing pemuda
25	Masih belum cukupnya upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	RSP.24	106	1	11	15.48	DINSOSPERMASDES	Bantuan untuk masyarakat miskin belum tepat sasaran	Masih tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin
26	Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah	RSP.24	505	1	54	8.41	BAPPEDA LITBANG	Belum tersusunnya roadmap SIDA	Kurangnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
27	Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)	RSP.24	505	1	54	8.12	BAPPEDA LITBANG	Belum terbentuk Klinik Kekayaan Intelektual	Tidak terlayannya Kekayaan intelektual masyarakat
28	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri	RSP.24	217	1	12	15.2	DINAKERKOP UKM	belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan usaha	Meningkatnya pengangguran
29	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia	RSP.24	207	1	12	17.2	DINAKERKOP UKM	Kurangnya kerjasama dengan dunia usaha dalam penjangkaran tenaga kerja	Meningkatnya pengangguran

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
30	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha	RSP.24	207	1	12	17.22	DINAKERKOP UKM	Belum adanya kebijakan yang mendorong pendidikan sekolah menengah dan sarjana memberikan pendidikan atau keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha	Meningkatnya pengangguran
31	adanya pernikahan usia dini	RSP.24	101	1	2	15.2	DINDIK	Implementasi kebijakan Wajar Dikdas belum optimal	Meningkatnya anak putus sekolah

ENTITAS:

R1. PEMKAB
R2. DINDIK
R3. DINKES
R4. RSUD BANYUMAS
R5. RSUD AJIBARANG
R6. DPU
R7. DINPERKIM

R8. BPBD
R9. BAKESBANGPOL
R10. SATPOL PP
R11. DINSOSPERMASDES
R12. DINAKERKOP UKM
R13. DLH
R14. DINDUKCAPIL

R15. DPPKBP3A
R16. DINHUB
R17. DINKOMINFO
R18. DPMPSTP
R19. DINPORABUDPAR
R20. DINARPUSDA
R21. DINKANNAK

R22. DINPERTAN KP
R23. DINPERINDAG
R24. SETDA
R25. SETWAN
R26. INSPEKTORAT
R27. BAPPEDALITBANG
R28. BAPENDA
R29. BKAD
R30. BKPSDM

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada dan risiko prioritas sudah ditetapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024-2026

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA						
1	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	KE	1	Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyumas lebih intensif melakukan evaluasi, pemantauan dan pendampingan atas implementasi SAKIP di seluruh PD dan telah memberikan rekomendasi perbaikan yang cukup spesifik pada masing-masing PD dan telah dipantau tindak lanjutnya, serta telah menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam melakukan evaluasi SAKIP	Inspektorat Daerah	Tahun 2023
2	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	KE	1	meningkatkan kualitas SPBE melaksanakan implementasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (Masterplan Smart City Kabupaten Banyumas) Tahun 2020-2024	Setda	Tahun 2023
3	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	KE	1	Meningkatkan pengawasan, pendampingan serta mengajukan unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK Tahun 2023	Setda	Tahun 2023
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
4	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	KE	1	Menindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dengan melakukan pemantuan secara terus menerus atau berkala untuk memastikan aplikasi yang ada dapat terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik	Setda	Tahun 2023

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
5	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	KE	1	1. Mempublikasi semua Dokumen perencanaan kinerja melalui website resmi Pemda dan PD 2. Mereview indikator kinerja semua PD yang belum cukup mengukur sasaran/ tujuan dan mendukung kinerja di atasnya 3. Mereview penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja baik di tingkat pemkab maupun PD dengan menyesuaikan dan mempertimbangkan realisasi capaian tahun sebelumnya 4. Mereview Pohon kinerja semua OPD dengan mengidentifikasi Critical Succes Factor (CSF) yang menggambarkan hubungan sebab-akibat	Bappedalitbang dan Bagian Organisasi Setda	Tahun 2023
6	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	KE	1	Mellakukan pendampingan dan evaluasi terhadap laporan kinerja pada seluruh OPD untuk mengungkapkan informasi yang cukup terkait analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan capaian kinerja	Setda	Tahun 2023
7	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	KE	1	Melakukan Reviu pohon kinerja dan penambahan atau perubahan target/indikator pada Perjanjian Kinerja berdasarkan capaian tahun sebelumnya	Setda, Bappedalitbang	2024-2026
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
8	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	KE	1	Melaksanakan Bimtek dan pendampingan kepada semua OPD dalam melakukan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peta proses bisnis	Setda	Tahun 2023
9	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	KE	1	Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan	Setda	Tahun 2023
10	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	KE	1	Melakukan pemantauan Tindak Lanjut hasil evaluasi AKIP pada perangkat daerah	Setda	2024-2026
11	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	KE	1	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang disusun oleh agen perubahan di semua Perangkat Daerah, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan berjalan secara optimal serta melakukan monitoring efektivitasnya inovasi OPD	Setda	Tahun 2023
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN						
12	-						
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT						

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
13	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022	KE	1	Mengoptimalkan Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berkala sebagai referensi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program atau kegiatan	Bappedalitbang	Tahun 2023
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA						
14	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	KE	1	mengintegrasikan seluruh IKU OPD termasuk PK menjadi bahan penyusunan SKP masing-masing pegawai	BKPSDM, Setda, Bappedalitbang	2024-2026
15	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	KE	1	Menerapkan sistem merit secara keseluruhan dengan maksimal dengan melakukan assesment kepada seluruh pegawai dan pemanfaatannya kepada pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta sistem reward dan punishment berdasarkan hasil kinerja	BKPSDM	Tahun 2023
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
16	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nomor B/929/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022	KE	1	Meningkatkan Peran APIP sebagai quality assurance and consulting pada OPD	Inspektorat Daerah	Tahun 2023
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT						
17	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023	KE	1	Melakukan monev kinerja secara lebih detail	Bappedalitbang	2024-2026

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) KE apabila Kurang Efektif;

(3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

FORMULIR KERTAS KERJA
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2024-2026		
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026		
Sumber Data	: RPD 2024-2026		
Tujuan Strategis RPD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan	
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Kurangnya minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal	RSP.24.209.01.00	Telah disusun Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Dinpertan KP
2	Masih kurangnya kuantitas ekspor dan nilai tambah produk unggulan	RSP.24.330.01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan kelembagaan yang memfasilitasi ekspor	Dinperindag
3	Belum efektifnya implementasi program pengendalian penduduk	RSP.24.214.01.00	Menindaklanjuti amanat Perpres No,153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	DPPKBP3A

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
4	Adanya anak usia sekolah yang bekerja	RSP.24.101.01.00	penyusunan kebijakan dan program pencegahan anak-anak putus sekolah karena pernikahan dini	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	sosialisasi kebijakan dan Implementasi program pencegahan anak-anak putus sekolah karena pernikahan dini. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai program seperti 'Jo Kawin Bocah', Kampung KB, PKK, dan lain sebagainya	Dindik
			Rencana Penyusunan kebijakan program "Mayuh Sekolah Maning"	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan program "Mayuh Sekolah Maning"	Dindik
5	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	RSP.24.105.01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana	BPBD
6	Masih adanya daerah rawan pangan	RSP.24.209.01.00	Mengimplementasikan Surat Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 379/KS.02.02/B/10/2022	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sinkronisasi program dan kebijakan terkait penanganan daerah rawan pangan sesuai pemetaan yang melibatkan stakeholder sesuai dengan kewenangan	DinpertanKP
7	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan	RSP.24.208.01.00	Telah disusun Perbup no 35 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan PUG	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemantauan pelaksanaan kebijakan PUG	DPPKBP3A
8	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas	RSP.24.208.01.00	Telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan RAD terkait Kabupaten Layak Anak	DPPKBP3A
9	Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	RSP.24.212.01.00	Mengimplementasikan Kebijakan Perbup No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Kebijakan pelayanan publik yang mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Dindikcapil

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
10	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat	RSP.24.105.01.00	Implementasi penegakan perda	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemantauan penegakan Perda	Satpol PP
11	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan	RSP.24.503.01.00	Mengimplementasikan Kebijakan - PP No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS - Permenpan RP No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	BKPSDM
12	Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja belum efektif mendukung kinerja Pemkab	RSP.24.401.01.00	Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemantauan Tindak lanjut Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Setda
13	Belum efektifnya pengelolaan risiko dan audit kinerja dalam upaya untuk pengendalian dan pencapaian tujuan pemkab	RSP.24.601.01.00	Telah tersusun Perbup Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Perubahan Perbup Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas disesuaikan dengan aturan terbaru	Inspektorat Daerah
14	Masih rendahnya kualitas air	RSP.24.211.01.00	PERDA Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi dan penguatan kelembagaan yang mengelola SDA	DLH
15	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi	RSP.24.327.01.00	Keputusan Bupati Banyumas No 521/196/Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B)	Dinpertan KP, Dinkannak
16	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah	RSP.24.327.01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu	Penyusunan dokumen rencana pangan	Dinpertan KP, Dinkannak

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
					menangani risiko yang teridentifikasi		
17	Menurunnya ketahanan infrastruktur	RSP.24.103.01.00	-	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mitigasi ketahanan Infrastruktur	DPU
			Pengendalian mutu infrastuktur	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kebijakan Pengawasan Pengendalian mutu infrastuktur	DPU
18	Belum meratanya pelayanan transportasi di semua wilayah	RSP.24.215.01.00	-	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Dinhub
19	Belum sinerginya pembangunan pemuda	RSP.24.219.01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	Dinporabudpar
20	Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab	RSP.24.401.01.00	Mengimplementasikan Permenpan RB no 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Setda
21	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE	RSP.24.401.01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Setda
22	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi	RSP.24.401.01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	Setda

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
23	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat	RSP.24.223.01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan penggunaan gadget oleh anak usia sekolah untuk literasi	Dinarpusda
24	Pengelolaan keuangan daerah kurang akuntabel	RSP.24.502.01.00	1. Telah disusunnya Perbup Banyumas Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, 2. Perbup Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemantauan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai ketentuan kebijakan	BKAD
25	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia	RSP.24.207.01.00	Kerjasama Tripartit	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	Dinakerkop UKM
26	Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)	RSP.24.505.01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual	Bappedalitbang
27	Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah	RSP.24.505.01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan roadmap SIDA	Bappedalitbang
28	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri	RSP.24.217.01.00	Telah disusun Perda Kabupaten Banyumas no 3 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemantauan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro	Dinakerkop UKM

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
29	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha	RSP.24.207.01.00	Penyelenggaraan Pelatihan di BLK	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	Dinakerkop UKM
30	belum optimalnya standar kesehatan Keluarga khususnya kesehatan Ibu dan anak	RSP.24.102.01.00	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting	Dinkes
31	Masih belum cukupnya upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	RSP.24.106.01.00	Telah disusun Perbup no 21 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemetaan masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi serta Koordinasi pelibatan seluruh stake holder dalam mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan	Dinsospermasdes, Dinperkim
32	adanya pernikahan usia dini	RSP.24.101.01.00	Rencana Penyusunan kebijakan program "Mayuh Sekolah Maning"	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan program "Mayuh Sekolah Maning"	Dindik

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) KE apabila Kurang Efektif;

(3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, web Pemerintah Kabupaten Banyumas) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/koordinasi/konsultasi/bimtek

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyusunan kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Rapat Koordinasi, SK Tim Penyusun	Dinpertan KP	Tim Penyusun Kebijakan	Tahun 2024-2026		
2	Penguatan kelembagaan yang memfasilitasi ekspor	Rapat Koordinasi, Bimtek	Dinperindag	Fasilitator ekspor, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
3	Penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, SK Tim Penyusun, dan Surat Edaran	Dindukcapil	Tim Penyusun, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
4	sosialisasi kebijakan dan Implementasi program pencegahan anak-anak putus sekolah karena pernikahan dini. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai program seperti 'Jo Kawin Bocah', Kampung KB, PKK, dan lain sebagainya	Rapat koordinasi, Sosialisasi, Surat Edaran	Dindik	OPD terkait dan instansi terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
5	Penyusunan kebijakan program "Mayuh Sekolah Maning"	Rapat Koordinasi dan SK Tim Penyusun Kebijakan	Dindik	Tim Penyusun kebijakan dan OPD terkait	Tahun 2024-2026		
6	Penyusunan Dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana	Rapat koordinasi, Sosialisasi	BPBD	Tim penyusun, OPD terkait dan pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
7	Sinkronisasi program dan kebijakan terkait penanganan daerah rawan pangan sesuai pemetaan yang melibatkan stakeholder sesuai dengan kewenangan	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, FGD	Dinpertan KP	OPD terkait, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
8	Pemantauan pelaksanaan kebijakan PUG	Rapat koordinasi, sosialisasi, FGD	DPPKBP3A	OPD terkait, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
9	Penyusunan RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi, dan SK Tim Penyusun	DPPKBP3A	Tim Penyusun, OPD terkait	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
10	Penyusunan Kebijakan pelayanan publik yang mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Rapat Koordinasi, FGD, Surat Edaran, SK Tim	Dindukcapil	Tim Penyusun, OPD terkait, dan pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
11	Pemantauan penegakan Perda	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Surat Edaran dan SK Tim Pemantauan Penegakan Perda	Satpol PP	Tim pemantauan penegakan Perda	Tahun 2024-2026		
12	Penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, SK Tim	BKPSDM	Tim Penyusun kebijakan, OPD terkait, dan pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
13	Pemantauan Tindak lanjut Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Rapat koordinasi, Sosialisasi, Surat Edaran	BKPSDM	OPD terkait, Tim perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja Pemkab	Tahun 2024-2026		
14	Perubahan Perbup Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas disesuaikan dengan aturan terbaru	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Surat Edaran	Inspektorat	Tim SPIP, OPD terkait	Tahun 2024-2026		
15	Koordinasi dan penguatan kelembagaan yang mengelola SDA	Rapat koordinasi	DLH	Tim Pengelola SDA, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
16	Penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B)	Rapat koordinasi, Surat Edaran dan SK Tim penyusun rekomendasi	Dinpertan KP	Tim Penyusun, OPD terkait dan pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
17	Penyusunan dokumen rencana pangan	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi	Dinpertan KP, Dinkannak	Tim penyusun , pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
18	Mitigasi ketahanan Infrastruktur	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	DPU	Tim mitigasi, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
19	Kebijakan Pengawasan Pengendalian mutu infrastruktur	Rapat Koordinasi, Surat Edaran, Sosialisasi dan SK Tim pengawasan	DPU	Tim pengawasan pengendalian infrastruktur, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
20	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Rapat Koordinasi dan SK Tim Penyusun	Dinhub	Tim penyusun rencana induk jaringan jalan, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
21	Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	Rapat Koordinasi, FGD, SK Tim Penyusun	Dinporabudpar	Tim Penyusun, OPD terkait dan pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
22	Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Rapat koordinasi, FGD, Sosialisasi	Setda	Tim penyusun kebijakan, OPD terkait, dan pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
23	Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Rapat koordinasi, FGD, Sosialisasi, SK Tim penyusun	Setda	Tim penyusun kebijakan, OPD terkait, dan pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
24	Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	Sosialisasi, Surat Edaran	Setda	OPD terkait dan pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
25	Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan penggunaan gadget oleh anak usia sekolah untuk literasi	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi	Dinarpusda	Masyarakat, OPD terkait, dan pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
26	Pemantauan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai ketentuan kebijakan	Rapat koordinasi, Sosialisasi	BKAD	OPD, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
27	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	Rapat Koordinasi dan Surat Kerjasama (MoU)	Dinakerkop UKM	Perusahaan mitra kerja, OPD terkait, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
28	Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi	Bappedalitbang	OPD terkait, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
29	Penyusunan roadmap SIDA	Rapat Koordinasi, FGD, SK Tim	Bappedalitbang	OPD terkait, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
30	Pemantauan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro	Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan SK Tim	Dinakerkop UKM	Pengusaha mikro, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
31	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	Rapat Koordinasi, Surat Kerjasama (MoU)	Dinakerkop UKM	Perusahaan mitra kerja, Pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
32	Penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting	Rapat koordinasi, SK Tim penyusun, Sosialisasi	Dinkes	Tim penyusun, pihak terkait lainnya	Tahun 2024-2026		
33	Pemetaan masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi serta Koordinasi pelibatan seluruh stake holder dalam mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan	Rapat koordinasi	Dinsospermasdes	Pihak/ OPD terkait	Tahun 2024-2026		

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Penyusunan kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Pembentukan Tim dan Rapat penyusunan kebijakan bersama tim yang telah dibentuk	Kepala Dinperten KP	Tahun 2024-2026		
2	Penguatan kelembagaan yang memfasilitasi ekspor	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan penguatan lembaga	Kepala Dinakerkop UKM	Tahun 2024-2026		
3	Penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan penyusunan GDPK	Kepala Dindukcapil	Tahun 2024-2026		
4	sosialisasi kebijakan dan Implementasi program pencegahan anak-anak putus sekolah karena pernikahan dini. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai program seperti 'Jo Kawin Bocah', Kampung KB, PKK, dan lain sebagainya	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan sosialisasi	Kepala Dindik	Tahun 2024-2026		
5	Penyusunan kebijakan program "Mayuh Sekolah Maning"	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan Pembentukan Tim penyusun serta Rapat koordinasi penyusunan kebijakan program "Mayuh Sekolah Maning"	Kepala Dindik	Tahun 2024-2026		
6	Penyusunan Dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan penyusunan dokumen	Kepala BPBD	Tahun 2024-2026		
7	Sinkronisasi program dan kebijakan terkait penanganan daerah rawan pangan sesuai pemetaan yang melibatkan stakeholder sesuai dengan kewenangan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan sinkronisasi program dan kebijakan	Kepala Dinperten KP	Tahun 2024-2026		
8	Pemantauan pelaksanaan kebijakan PUG	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan pemantauan	Kepala DPPKBP3A	Tahun 2024-2026		
9	Penyusunan RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan, laporan kegiatan penyusunan RAD, SK Tim Penyusun RAD	Kepala DPPKBP3A	Tahun 2024-2026		
10	Penyusunan Kebijakan pelayanan publik yang mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan, laporan kegiatan penyusunan kebijakan, dan Laporan Kebijakan pelayanan publik	Kepala Dindukcapil	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
11	Pemantauan penegakan Perda	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan pemantauan penegakan perda	Kepala Satpol PP	Tahun 2024-2026		
12	Penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan penyusunan kebijakan, SK Tim Penyusun kebijakan	Kepala BKPSDM	Tahun 2024-2026		
13	Pemantauan Tindak lanjut Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Konfirmasi pelaksanaan pemantauan dan laporan pemantauan tindak lanjut evaluasi	Kepala BKPSDM	Tahun 2024-2026		
14	Perubahan Perbup Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas disesuaikan dengan aturan terbaru	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan perubahan perbup, dan Perbup perubahan terbaru No 64 Tahun 2010	Inspektur Daerah	Tahun 2024-2026		
15	Koordinasi dan penguatan kelembagaan yang mengelola SDA	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan koordinasi dan penguatan kelembagaan	Kepala DLH	Tahun 2024-2026		
16	Penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B)	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kebijakan perlindungan lahan pangan dan pertanian berkelanjutan	Kepala Dinperten KP, Dinkannak	Tahun 2024-2026		
17	Penyusunan dokumen rencana pangan	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan dan dokumen rapat koordinasi penyusunan	Kepala Dinperten KP, Dinkannak	Tahun 2024-2026		
18	Mitigasi ketahanan Infrastruktur	Konfirmasi pelaksanaan mitigasi dan laporan rapat koordinasi mitigasi	Kepala DPU	Tahun 2024-2026		
19	Kebijakan Pengawasan Pengendalian mutu infrastuktur	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi/FGD kebijakan pengawasan	Kepala DPU	Tahun 2024-2026		
20	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan dan laporan kegiatan rapat koordinasi/FGD penyusunan RIJJ	Kepala Dinhub	Tahun 2024-2026		
21	Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan rapat koordinasi/ FGD penyusunan RAD	Kepala Dinporabudpar	Tahun 2024-2026		
22	Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat penyusunan kebijakan internal	Sekretaris Daerah	Tahun 2024-2026		


No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
23	Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat penyusunan kebijakan MR SPBE	Sekretaris Daerah	Tahun 2024-2026		
24	Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan laporan rapat koordinasi/ Sosialisasi kegiatan penandatanganan komitmen	Sekretaris Daerah	Tahun 2024-2026		
25	Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan penggunaan gadget oleh anak usia sekolah untuk literasi	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi/ FGD/ Sosialisasi penyusunan kebijakan	Kepala Dinarpusda	Tahun 2024-2026		
26	Pemantauan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai ketentuan kebijakan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pemantauan	Kepala BKAD	Tahun 2024-2026		
27	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi Kerjasama	Kepala Dinakerkop UKM	Tahun 2024-2026		
28	Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi/ Sosialisasi pembentukan klinik kekayaan intelektual	Kepala Bappedalitbang	Tahun 2024-2026		
29	Penyusunan roadmap SIDA	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi/ FGD penyusunan roadmap	Kepala Bappedalitbang	Tahun 2024-2026		
30	Pemantauan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan	Kepala Dinakerkop UKM	Tahun 2024-2026		
31	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi kerjasama	Kepala Dinakerkop UKM	Tahun 2024-2026		
32	Penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi penyusunan kebijakan	Kepala Dinkes	Tahun 2024-2026		
33	Pemetaan masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi serta Koordinasi pelibatan seluruh stake holder dalam mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi/ FGD pemetaan Masyarakat miskin	Kepala Dinsospermasdes	Tahun 2024-2026		

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektivitas RTP yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, Juni 2023
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

